



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA  
KOMISI XI DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- :  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
1. Menteri PPN/Ka. Bappenas;  
2. Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);  
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan  
Dengan : Pembangunan (BPKP);  
4. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan  
Jasa Pemerintah (LKPP);  
5. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 16 September 2019  
Waktu : 16.00 WIB s.d .... WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusntara I  
Ketua Rapat : Ir. H. Soepriyatno  
Sekretaris Rapat : Drs. Urip Soedjarwono  
Acara : Penyesuaian Hasil Badan Anggaran RKAKL  
Hadir Pemerintah : 1. MENTERI PPN/Ka. BAPPENAS/BAMBANG  
BRODJONEGORO;  
2. SEKJEN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
(BPK)/BAHTIAR ARIF;  
3. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN (BPKP)/ARDAN ADIPERDANA;  
4. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG DAN JASA PEMERINTAH  
(LKPP)/RONI DWI SUSANTO;  
5. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
(BPS)/SUHARYANTO.

## **JALANNYA RAPAT:**

### **KETUA RAPAT (Ir. H. SOEPRİYATNO/F-P. GERINDRA):**

Selesaikan yang sudah ada dulu, biar kita selesaikan lebih cepat. Di sini ada Bappenas, BPK, BPS, BPKP, LKPP, nanti Menteri Keuangan sesi kedua kalau beliau hadir bisa langsung.

*Bismillahirrahmanirahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
**Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.**

**Yang terhormat saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajarannya, saudara Sekjen BPK RI beserta jajaran, saudara Kepala BPS beserta jajaran, saudara Kepala BPKP beserta jajaran dan saudara Kepala LKPP beserta jajarannya,**  
**Yang kami hormati Anggota Komisi XI DPR RI,**  
**Dan hadirin sekalian yang berbahagia.**

Menurut catatan yang kami terima dari sekretariat, daftar hadir rapat telah ditandatangani oleh 15 Anggota dan 8 Fraksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, ijin kami membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekjen BPK R, Kepala BPS, Kepala BPKP dan Kepala LKPP dan dinyatakan terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA PUKUL 16.00 WIB)**

#### **Hadirin yang kami hormati.**

Mengawali Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat pada hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI dalam keadaan sehat wal'afiat.

Semoga apa yang akan kita bicarakan dan simpulkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Agenda hari ini adalah membahas surat dari Pimpinan Badan Anggaran Nomor AG/15093/DPRRI/IX/2019 tanggal 10 September 2019 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2020.

Sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Panja Belanda Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR RI dalam rangka pembicaraan Tingkat Pertama atau pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2020 dengan mitra Komisi XI DPR RI, telah diputuskan bahwa:

1. Anggaran BPK RI tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp3.500.037.000.700,-  
Jadi artinya anggaran tambahannya tidak ada, jadi sesuai dengan anggaran yang utama, anggaran tambahan yang diminta Rp860 miliar tidak dipenuhi.
2. Anggaran Kementerian Keuangan tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp43.511.200.000.000,-
3. Anggaran BPS berkurang Rp1 miliar karena penyesuaian PNBPN, sehingga menjadi sebesar Rp7.927.800.000.000,-
4. Anggaran Kementerian PPN/Kepala Bappenas tidak mengalami perubahan, sebesar Rp1.828.700.000.000,-
5. Anggaran BPKP tidak mengalami perubahan, yaitu sebesar Rp1.861.000.000.000,-
6. Anggaran LKPP tidak mengalami perubahan sebesar Rp169.700.000.000,-  
artinya tambahannya tidak disetujui oleh Banggar.

Jadi sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (3) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, maka Komisi XI DPR RI harus menetapkan alokasi anggaran yang telah diputuskan oleh Badan Anggaran DPR RI. Perlu kami beritahukan bahwa RKA mitra kerja Komisi XI DPR RI tersebut telah dilakukan pembahasan sebelumnya dan mendapatkan persetujuan oleh Komisi XI DPR RI.

Untuk itu, saya menanyakan kepada Anggota dan mitra kerja Komisi XI DPR RI apakah hasil penyesuaian RKA mitra kerja Komisi XI DPR RI hasil Badan Anggaran tersebut dapat disetujui? Setuju ya mitra ya?

Silakan kepada Anggota apakah dapat disetujui ini penyesuaian anggaran dari Banggar kepada kita. Intinya tetap tidak ada perubahan apa-apa, kecuali yang minta tambahan kemarin tidak disetujui. Setuju ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

**F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):**

Pimpinan, ijin Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PG (M. SARMUJI, S.E., M.Si.):**

Meskipun sudah disetujui, tapi kami ingin memberikan catatan, catatannya bukan pada proses persetujuan di Banggar, tetapi saya ingin memberikan atensi tentang anggaran BPK sebagaimana kemarin yang sempat mencuat pembahasannya di kita pada waktu seleksi BPK. Jadi pada tahun-tahun kedepan kita berharap

anggaran BPK itu tidak terlalu kecil seperti halnya sekarang. Dan kalau BPK itu ada pemotongan-pemotongan yang pemotongan itu biasanya dilakukan pada belanja barang pasti itu akan mengganggu kinerja BPK, karena BPK ini memang fungsinya kebanyakan masuk pada katagori belanja barang.

Karena ini mumpung ada semua, mumpung Kemenkeu juga ada, Bappenas ada, kita berharap lembaga-lembaga seperti halnya BPK yang melakukan fungsi pemeriksaan, lembaga DPR RI yang melakukan fungsi pengawasan dan lembaga-lembaga yang lain yang serupa dengan itu saya harap anggarannya tidak dikecilkan. Kenapa? Karena bagaimana pun pengawasan dan pemeriksaan itu penting untuk menjaga tujuan departemen-departemen, tujuan kementerian-kementerian, tujuan Pemerintah dan tujuan kita bersama untuk membuat anggaran ini efektif dan efisien mencapai kesejahteraan rakyat. Itu catatan kami dari Fraksi Partai Golkar.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Nanti akan kita sampaikan pada saat dengan Menteri Keuangan sebentar lagi beliau akan hadir. Yang penting sudah kita setuju, berarti rapat kita tolong sampaikan kesimpulan.

**F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):**

Mohon maaf Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):**

Terima kasih.

Saya hanya ingin mendapatkan klarifikasi, kebetulan ini Menteri Keuangan tidak ada tapi mungkin ada yang pejabat.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar lagi, nanti setelah selesai ini baru kita dengan Menteri Keuangan. Jadi nanti apa yang akan disampaikan pada Menteri Keuangan pada saat nanti.

**F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):**

Dari LMAN ada tidak?

Mungkin bisa dijawab dari LMAN saja.

**KETUA RAPAT:**

Belum, Menteri Keuangan belum hadir, nanti setelah ini.

**F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, sudah ya.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Ibu.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan, Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati, Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala BPKP, Menteri Keuangan, Sekjen BPK RI, Kepala BPS dan semua yang hadir yang saya hormati.**

Memang ini merupakan rangkaian dari pekerjaan kita yang panjang, sehingga hari ini kita sampai kepada diminta untuk menyetujui jika ada pergeseran-pergeseran yang terjadi di Badan Anggaran. Namun, ijin saya menyampaikan bahwa kalau bentuk materi yang diberikan kepada kita seperti ini, bahan mana yang bisa dijadikan oleh DPR RI sebagai alat untuk melakukan pengawasan, terutama pengawasan anggaran.

Saya minta maaf kebetulan paling atas ini materi dari BPS, dari tumpukan ini. Dari sekian halaman buku berwarna ini 1 sampai dengan halaman 18 hanya satu halaman 15 yang menulis tentang angka-angka itu. Jadi ini mohon tidak keterlaluhan kita menterjemahkan bahwa DPR RI tidak boleh membahas satuan 3. Saya pernah di BKO ke Komisi V DPR RI 6 bulan sambil merangkap dua komisi oleh Partai saya. Tidak seperti ini mitra disana menterjemahkan bahwa DPR RI tidak bisa melihat satuan 3.

Jadi oleh sebab itu, mungkin untuk kedepan-kedepannya Pimpinan, agar kita ini punya tugas ada panduan dilapangan untuk melakukan pengawasan, maka sebaiknya tidak seperti ini materi yang disampaikan kepada Komisi XI DPR RI.

Termasuk barusan saya buka Menteri Keuangan, ini masih mending biasanya hanya 5 lembar, judul rapat, daftar dirjen-dirjennya, sebaran fungsi dirjen halaman 4, halaman 5, terima kasih.

Oleh sebab itu, sekali lagi kalau soal sikap Komisi XI DPR RI saya lihat tiada bandingnya dibandingkan Komisi lain. Saya berani mengatakan begitu, paling lancar rapatnya, paling baik komunikasinya, tetapi bukan berarti pula kita tidak punya ruang untuk melakukan pengawasan-pengawasan terhadap anggaran mitra kita. Saya ingin sebenarnya BPS melihat di adopt tidak usulan bahwa misalnya para petugas pengambil data itu harus berpakaian sebagai seorang pengambil data, agar mereka tidak ditolak-tolak oleh Ibu-Ibu di rumah ketika rumahnya dikunjungi oleh petugas. Ini kesannya sederhana, uangnya tidak banyak, tapi prinsip setelah saya turun ke lapangan. Tidak bisa kita baca disini apakah yang usul-usulan kita disini, kita semangat mengikutinya, apakah itu di terima oleh mitra kerja kita, kita tidak bisa kontrol. Jadi saya pikir kedepan mungkin diperbaiki sangat lemah bentuk alat untuk evaluasi anggaran pengawasan yang diberikan kepada Komisi XI DPR RI.

Terima kasih banyak.

Semoga anggaran ini bermanfaat untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia semua.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Bapak Harry.

**F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):**

Mohon ijin, Pimpinan.

Terima kasih.

Saya ingin memperkuat usulan atau komentar Ibu Elviana tadi. Saya memang merasakan walaupun salah satu tugas pokok DPR RI itu bicara masalah APBN, saya juga menginginkan sebetulnya DPR RI atau dalam hal ini kita sebagai pionir saja Komisi XI DPR RI ini karena kita bermitra dengan Kementerian Keuangan. Apakah dimungkinkan atau apakah tidak sebaiknya kita bersama mitra itu duduk bersama membuat satu sistematika, bicara penyampaian atau penulisan usulan anggaran ini sehingga kita juga mempelajarinya juga lebih mudah. Jadi sistematika penganggaran ini semua Kementerian menganut pola yang sama. Jadi tidak bisa misalkan Bappenas sistematikanya seperti ini, kementerian yang lain berbeda. Walaupun mungkin nomenklaturnya memang tidak sama. Tetapi paling tidak sistematika penyajiannya itu

sama sehingga kita memudahkan, memahami dan sekaligus memudahkan untuk tugas kita sebagai pengawas.

Kalau penyajian seperti ini memang saya juga bisa merasakan sulit, walaupun kita dibatasi tapi dari tatacara penyajian penyampaian usulan ini sistematikanya kita sepakati, kita atur, saya pikir akan lebih mudah. Dan saya yakin juga akan memperlancar di dalam pembahasan di masa-masa yang akan datang. Mumpung kita memasuki nanti anggaran atau tahun kerja yang baru.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Saya kira itu catatan-catatan yang mungkin akan kita laksanakan nanti pada saat Anggota baru ya, karena memang ini masalah pengawasan saya kira mungkin kita lebih baik kita nanti setelah Anggota baru tentunya catatan di Komisi XI DPR RI bagaimana kita bisa sama mitra kita membuat pengawasan nomenklatur yang tepat, sehingga pengawasannya lebih gampang di lapangan. Saya kira itu jadi catatan-catatan kita.

Selanjutnya kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya ingin menyampaikan...(suara tidak jelas)

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PDIP (INDAH KURNIA):**

Mungkin kalau pertanyaan tidak ada, karena memang pada dasarnya kita inikan hanya memberikan persetujuan setelah RKAKL dengan Banggar. Tidak ada tambahan tadi kecuali ada yang meminta tambahan satu kalau tidak salah BPS yang tidak disetujui.

Tapi kalau memang kita ingin melakukan pengawasan sebenarnya memang kalau dipikir satun 3 itukan tidak diberikan kewenangan di dalam Undang-Undang. Saya kira tidak bisa melihat sampai ke dalam, tapi dengan sumber daya yang ada ini ada gap antara kami Komisi XI DPR RI itu dengan mitra kerja. di sanakan tentu sudah satu kesatuan yang sangat lengkap, solid dan sudah tahulah apa yang harus dikerjakan, sementara kami dengan staf ahli kami, dengan asisten pribadi kami yang semua sudah terbatas tentu sulit melakukan fungsi kami secara maksimal.

Namun demikian, kami hanya berpesan saja output dari anggaran yang kita setuju ini adalah kinerja. Khususnya bagi mitra kerja yang saat ini mungkin langsung berhubungan dengan daerah-daerah. Banyak sekali Undang-Undang maupun

peraturan-peraturan yang ada di pusat itu tidak sejalan atau tidak sinkron dengan yang ada di daerah. Sementara yang di pusat khususnya Presiden dan kami juga selalu berusaha untuk yang namanya menghadapi atau menyikapi tentang masalah global ekonomi ini uncertainty, unpredictable, dan lain sebagainya itu dengan mencoba untuk iklim usaha atau iklim investasi yang ramah. Yang mampu membuat investor itu hadir dan nyaman berinvestasi di Indonesia. Tapi dalam pelaksanaannya di daerah itu banyak sekali perilaku-perilaku yang menurut pengamatan itu tidak sejalan dengan tujuan atau harapan kita untuk memberikan iklim investasi yang nyaman dan bersahabat apalagi menjemput bola. Orang datang saja kadang-kadang tidak mendapatkan perlakuan yang dalam tanda kutip kurang bersahabat, bukan hanya Pemerintah Daerah tetapi instansi-instansi yang berkaitan dengan hadirnya para investor.

Jadi itu banyak sekali keluhan masukan dan saya berharap dengan tulus Bapak dan Ibu yang ada di depan kami ini bisa menjalankan peran dan fungsinya agar benar-benar menggunakan anggaran yang ada, yang orientasinya adalah membuat khususnya para pelaku usaha, sudah deh kalau kita tidak mau mikir investor asing, kita pikirkan pelaku usaha yang ada di dalam negeri agar mereka benar-benar merasa nyaman dan aman bekerja membuka ruang untuk penyerapan tenaga kerja yang membantu Pemerintah mengurangi pengangguran, kemiskinan, gap, dan lain sebagainya itu adalah dengan memberikan keberpihakan yang jelas. Tidak lagi mereka itu ditakut-takuti apalagi dipersulit di dalam membuka usaha baru. entah caranya bagaimana saya tidak tahu, tetapi kami mohon dengan tulus baik itu BPKP mungkin yang selalu invest di dalam berada di Pemerintah Daerah atau dimana itu bisa benar-benar menjadi jembatan atau menjadi pengawal yang baik, agar pelaku usaha mulai yang kecil-kecil, mikro, kecil, menengah itu bisa merasa nyaman dan aman di dalam berusaha. Kita galakkan sektor yang namanya UMKM, dan mereka kita berikan keberpihakan secara konkrit tidak hanya dibibir, tidak hanya dituliskan, tidak hanya di program-program, tapi dalam kenyataan yang sesungguhnya.

Itu saja pesan dari kami, terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Cukup ya Ibu Indah, jadi catatan-catatan yang mau di sampaikan kepada mitra kerja kita. Kalau tidak ada saya bacakan kesimpulan dan tidak perlu persetujuan, karena tadi sudah disetujui. Jadi ini saya sampaikan saja supaya ada catatan kita di tengah kesimpulan.

1. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) dalam RAPBN tahun 2020 sebesar Rp7.927.750.271.000,- dengan rincian:
  - a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPS.  
Angkanya sudah ada di atas kalau saya bacakan satu per satu nanti kelamaan.



2. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Periksaan Keuangan (BPK) dalam RAPBN tahun 2020 sebesar Rp3.537.736.904.00,- rinciannya jelas:
  - a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPK.
  - b. Program pemeriksaan keuangan negara.  
Angkanya sudah ada di layar monitor.
  
3. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam RAPBN Tahun 2020 sebesar Rp1.860.968.834.000,- dengan rincian:
  - a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP.  
Rupiahnya ada di layar monitor.
  - b. Pengawasan internal akuntabilitas keuangan negara serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern Pemerintah.
  
4. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas dalam RAPBN tahun 2020 sebesar Rp1.828.689.846.000,- dengan rincian:
  - a. Perencanaan pembangunan nasional.
  - b. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
  - c. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur.  
Angkanya ada di monitor, tolong dicek jangan sampai ada kelebihan dan kurang.

**F-PKS (H. REFRIZAL):**

Untuk anggaran pemindahan ibu kota itu ada tidak angkanya.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar saya bacakan dulu, nanti habis itu tanya ya.

5. Komisi XI DPR RI menyetujui pagu anggaran LKPP dalam RAPBN tahun 2020 sebesar Rp169.675.434.000,- dengan rincian:
  - a. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya LKPP.
  - b. Pengembangan sistem pengadaan barang atau jasa Pemerintah.  
Saya kira ini sudah disetujui mengenai angka-angkanya tadi Pak, tinggal catatan-catatannya tadi dari Bappenas.  
Kami persilakan kepada Bapak Refrizal mau menyampaikan catatan.

**F-PKS (H. REFRIZAL):**

Catatan saya cuma satu kepada Bappenas, sebelumnya Bapak Bambang hadir juga disini. Saya sudah sampaikan juga.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**Salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang saya hormati Bapak Menteri Bappenas, Menteri Keuangan, Kepala BPS, BPK, LKPP, Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota Komisi XI DPR RI yang saya hormati.**

Saya memang agak keberatan dengan pindah ibu kota ini, makanya saya mau tanya sejauhmana Bapak mempersiapkan anggaran. Sebentar lagi kita mau bahas Undang-Undangnya, nanti saya khawatir Undang-Undangnya jadi, Ibu Kota belum pindah, ibu kota kita masih Jakarta. Seandainya Undang-Undang ini jadi diketok, kan realnya kita masih di Jakarta Ibu Kotanya, bagaimana kira-kira. Sejauhmana kajiannya nanti, inikan perlu kajian yang mendalam. Kita pindah kan bukan hanya kantor Presiden saja yang pindah atau kantor PU kita pindah kesana. Tapi semuanya, apa kita pikirkan Duber juga tidak perlu pindah, bagaimana duta besar negara-negara sahabat, kan semua harus dipikirkan, kan pertahanan dan keamanan kita juga harus pindah kesana, kan panjang ini cerita.

Nah, ini yang saya pikirkan tidak bisa dijawab sama otak saya. Saya ingin jelas dari Bappenas ini yang otaknya pintar-pintar saya ingin jelas. Masyarakat juga tanya kepada saya dan saya tidak bisa menjawab juga. Negara ini satu kesatuan Pak, tidak bisa kita pisahkan, Presiden sebelumnya dan sekarang tidak bisa dipisahkan. Dulu kami telah mengkonfirmasi kepada Bapak SBY kita pindah Ibu Kota tidak Pak? tidak. Karena ditegaskan DPR RI bangun disini kalau begitu, iya bangun disini. Tiba-tiba mimpi semalam kita pindah ibu kota. Kalau jaman Nabi Sulaiman gampang Pak, sehari semalam kerahkan pasukan jin semua bisa pindah kita. Apalagi di Penajam itu Pak, tidak ada pasir, tidak ada batu, biayanya besar, berapa kira-kira untuk kita, ekonomi lagi semrawut sekarang kita gagah-gagahan mau pindah. Ini saya tidak setuju Pak, hanya sekedar legacy saja bahwa jaman saya pindahnya Ibu Kota, ini saya tidak setuju.

Nah, inilah saya kira kita berdiskusi bila perlu siang dan malam nanti kita diskusinya. Kita akan datangkan ahli-ahlinya juga, bagaimana urgency-nya. Ada apa sebetulnya dengan Jakarta kita tiba-tiba kita ingin pindah dari Jakarta, ada apa kira-kira Jakarta. Kota bersejarah ini Jakarta Pak, proklamasi di Jakarta, bersejarah, ada Batavia disini. Dulu saya belajar ilmu bumi dulu kenapa Ibu Kota di Jakarta, diajarin kita tempatnya strategis, semua dikaji efek itu semua, jauh dari serangan musuh juga jauh. Nah, tiba-tiba kita mimpi mau pindah ibu kota, kalau Laboan Bajo mungkin saya masih mikir-mikir.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Bapak ini catatan saja, karena kemarin juga sudah kita lakukan pendalaman mengenai pemindahan ibu kota dan saya kira dan nanti ada Pansus. Ini masih jauh karena Undang-Undang IKN juga belum dibahas, lihat saja belum. Kemudian

pencabut IKN DKI Jakarta juga belum, jadi jauh sekali. Jadi saya kira nanti mungkin di rangkaian yang akan datang...(suara tidak jelas)

**F-PKS (H. REFRIZAL):**

Jawaban singkat dulu dengan Bapak Menteri, biar kita puas sebentar kan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Bapak Menteri.

**MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:**

Ya, mungkin jawaban singkat, karena pertanyaan Bapak Refrizal cukup panjang. Tapi intinya sebenarnya yang bisa kami jelaskan mengenai ibu kota sudah menjawab semua apa yang menjadi konsen Bapak Refrizal. Jadi memang seperti usulan kami, kita mengadakan pertemuan khusus dengan Komisi XI DPR RI membahas mengenai ibu kota dan sudah diagendakan melalui sekretariat Komisi XI DPR RI. Jadi saya harapkan Bapak Refrizal bisa hadir, itu paling penting, karena kalau tidak hadir saya harus cerita dua kali.

Tapi satu hal Bapak Refrizal, mengenai Undang-Undang nya nanti kita sampaikan pasti itu adalah Undang-Undang Penetapan Status. Penetapan statusnya memang nanti akan ditulis tidak seketika, tidak Undang-Undang nya disahkan, kalau seperti Undang-Undang APBN disahkan pun misalkan kita misalkan katakan minggu depan Paripurnanya DPR RI, itukan tidak berarti langsung APBN 2020 berlaku tanggal misalkan 26 September, baru berlakunya 1 Januari 2020. Jadi artinya, Undang-Undang itu menyatakan kapan ibu kotanya itu ditempat yang baru tadi.

Jadi untuk menjelaskan bukan berarti kemudian kita akan menghadapi kondisi seperti yang dikatakan. Dan studynya sudah cukup panjang, sudah menyeluruh, sudah melibatkan banyak pihak, nanti bisa kami *share* detailnya, karena kalau di forum ini mungkin terlalu teknis. Tapi intinya saya siap membahas dan sudah dikomunikasikan dengan Pimpinan Komisi XI DPR RI.

Demikian Bapak Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Jadi nanti hari Jumat akan kita laksanakan FGD dengan Bappenas, mengenai pemindahan ibu kota.

**F-P. GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):**

Pimpinan, loasi FGD-nya di Jakarta saja supaya hemat, efisien kita.

**KETUA RAPAT:**

Di Jakarta, jam 14.00 WIB.  
Saya kira itu ya.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Pimpinan sebentar.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**F-PPP (Dra. ELVIANA, M.Si.):**

Tanggal 20 Jumat ya Pak Menteri? Jadi nanti saya mohon maaf tidak bisa hadir. Cuma saya ingin menyampaikan kepada Bapak Menteri, jika ini sukses ada dua nama dalam sejarah. Satu, Bambang Brodjonegoro sebagai perencana, konseptor. Dan satu lagi, Joko Widodo sebagai eksekutor, selamat untuk Bapak berdua.

**KETUA RAPAT:**

Cukup ya.  
Jadi sekali lagi tadi sudah kita setuju dan sudah saya ketok.  
Kami persilakan kepada Bapak Menteri untuk menyampaikan kata akhir.

**MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS:**

**Bapak-bapak Pimpinan, serta Ibu dan Bapak Anggota Komisi XI DPR RI.**

Meskipun mungkin beberapa harapan dan permintaan dari beberapa rekan disini, dari LKPP, BPKP dan BPK barangkali belum bisa diakomodasi. Setelah pembahasan Panja atau penentuan postur sementara, namun tentunya kami semua tetap berkomitmen untuk menggunakan anggaran yang tadi sudah ditetapkan tahun depan dengan sebaik mungkin, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, mengupayakan penghematan dan tentunya tanpa mengorbankan output yang tentunya sangat diharapkan oleh Bapak dan Ibu sekalian.

Dan juga terima kasih atas dukungan yang selalu diberikan secara penuh oleh Bapak dan Ibu Komisi XI DPR RI terhadap para mitra di meja ini yang tadi juga termasuk BPS. Dan mudah-mudahan tentunya hubungan kemitraan ini berjalan terus dan dengan baik dan tentunya memberikan manfaat bagi bangsa dan negara.

Demikian, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat ini saya tutup.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL ... WIB)**

**Jakarta, 16 September 2019**

**a.n. Ketua Rapat  
Sekretaris Rapat**

**ttd**

**Drs. Urip Soedjarwono  
NIP. 19620521 198203 1 001**